

**KERJASAMA KODIM 0503/JB DENGAN PEMERINTAH KOTA JAKARTA BARAT
UNTUK MENANGANI BANJIR GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS DI
WILAYAH JAKARTA BARAT**

**COOPERATION OF KODIM 0503 / JB WITH THE GOVERNMENT OF WEST
JAKARTA TO HANDLE FLOODS IN ORDER TO MAKE A STABILITY IN THE WEST
JAKARTA REGION**

Akhmad Rifai¹, Yudi Rusfiana², Ridwan Gunawan³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat

(Rifaiakhmad83@yahoo.co.id, rusfianayoudhy@gmail.com,
gunawanridwan1992@gmail.com)

Abstrak--DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah yang paling rawan terjadi bencana banjir setiap tahunnya. Kurangnya ruang terbuka hijau yang menjadi resapan air serta pendangkalan sungai akibat sampah warga adalah yang melatar belakangi terjadinya banjir tersebut. Disamping itu wilayah Jakarta Barat juga merupakan daerah yang di melewati aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Kondisi tersebut, secara alamiah memposisikan wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Kodim 0503/JB sebagai satuan teritorial di wilayah Jakarta Barat yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Perkasad Nomor/111/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem. Juga memiliki serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam UU TNI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah melalui kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dapat menangani banjir, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kerjasama tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, analisis data menggunakan analisis domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Untuk mewujudkan serta mengoptimalkan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat, perlu adanya koordinasi dan bersinergi dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kota Jakarta Barat. Selain itu dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas wilayah perlu meningkatkan kemampuan deteksi dini, kesiapsiagaan dan respon dalam menghadapi bencana banjir. Dengan demikian implikasi dari bentuk kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam penanggulangan bencana banjir berpengaruh baik terhadap ketahanan wilayah Kota

¹ Alumni Program Studi Strategi Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

² Dosen Universitas Pertahanan

³ Sekretaris Program Studi Strategis Pertahanan Darat Universitas Pertahanan

Jakarta Barat dan secara terus menerus kerjasama tersebut perlu dilaksanakan agar dapat menuntaskan permasalahan banjir yang sering melanda Kota Jakarta Barat sebagaimana yang diinginkan oleh satuan atas maupun masyarakat.

Kata kunci: Kerjasama, Menangani Banjir dan Mewujudkan Stabilitas Wilayah

Abstract--DKI Jakarta, especially in the West Jakarta region, is one of the areas most prone to floods every year. The lack of green open space which is a catchment of water and siltation caused by residents' waste is the background of the flooding. Besides that the West Jakarta region is also an area that passes through the river flow that empties into the Jakarta Bay. This condition, naturally positioning the DKI Jakarta region, especially West Jakarta, has a high vulnerability to flooding. Kodim 0503 / JB as a territorial unit in the West Jakarta region which has a main task in accordance with Perkasad Number / 111 / XII / 2012 dated 12 December 2012, namely conducting capacity building, power and title, organizing territorial guidance to prepare land defense areas and maintaining security its territory in order to support the core tasks of the Korem. Also has and carries out the duties and responsibilities as mandated in the TNI Law. The purpose of this study was to analyze whether through the collaboration of Kodim 0503 / JB with the West Jakarta City Government to be able to handle flooding, and to analyze the constraints faced in realizing such cooperation. This study uses a qualitative method. Data obtained through observation, interviews and library studies. More data analysis techniques are carried out together with data collection when researchers are in the field, analyzing data using domain analysis. The results of the study show that: To realize and optimize the collaboration of Kodim 0503 / JB with the West Jakarta City Government, there is a need for coordination and synergy in every disaster management activity in the West Jakarta City area. In addition to improving regional security and stability, it is necessary to improve the ability of early detection, preparedness and response in the face of floods. Thus the implications of the collaboration between Kodim 0503 / JB and the West Jakarta City Government in flood mitigation have a good effect on the resilience of the West Jakarta City and continuously the cooperation needs to be carried out in order to solve the flood problems that often hit West Jakarta as desired by unit as well as the community.

Keywords: Cooperation, Flood Handling, Creating Stability in The Region

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat

menghambat pembangunan nasional.⁴ Hal ini di karenakan Indonesia secara geografis terletak diantara lempengan-lempengan dunia yang posisinya saling bertumbukkan yang menyebabkan terjadinya gempa. Letak geografis Indonesia yang terletak diantar lempengan IndoAustralia, Eurosia, dan lempengan Carolina (Pasifik) menyebabkan kemungkinan besar

⁴ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

terjadinya gempa tektonik. Disisi lain letak geografis Indonesia yang terletak pada "cincin api pasifik" atau "*Pacific fire ring*" telah menyebabkan Indonesia mempunyai gunung berapi yang terbanyak di dunia yang sangat berpotensi menimbulkan gempa Vulkanik dan timbulnya erupsi yang dapat mengakibatkan bencana yang merenggut korban jiwa, harta dan materiil yang tidak sedikit.

Disamping itu letak geografis Indonesia berada pada garis Khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia berada pada iklim tropis dimana iklim di Indonesia mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi tersebut dapat menimbulkan dampak terjadinya bencana apabila resapan air tidak berjalan alami atau normal. Banyaknya pembukaan lahan perkebunan secara liar, penebangan pohon yang liar tanpa diimbangi oleh penghijauan yang sinergis dapat mengakibatkan bencana alam diantaranya banjir bandang, tanah longsor. Selain itu iklim tropis yang dimiliki oleh Negara Indonesia pada saat musim kemarau sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan.

Dampak dari peristiwa-peristiwa bencana alam tersebut banyak

menimbulkan kerugian fisik dan non fisik, harta dan benda masyarakat, serta sarana dan prasarana pemerintah yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah (lokal) dan nasional, terutama berpengaruh kepada sektor; keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI Jakarta dan Satuan jajaran TNI, perlu tanggap untuk menyikapi dengan cepat dan secara simultan dampak dari bencana alam tersebut, guna memberikan bantuan penanggulangan kepada masyarakat DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat akibat dari bencana banjir, dengan melakukan tindakan pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, sehingga situasi dan kondisi daerah bencana segera dapat berfungsi normal dan kondusif kembali. Mitigasi daerah rawan bencana banjir yang terjadi di Ibu Kota Jakarta merupakan salah satu tahapan yang sangat vital dalam manajemen bencana, terutama yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Hal ini dikarenakan wilayah DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Barat yang merupakan dataran rendah dengan

ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. Disamping itu wilayah Jakarta Barat juga merupakan daerah yang di melewati aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Kondisi tersebut, secara alamiah memposisikan wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Berulangnya kejadian banjir per lima tahun menyebabkan banyak kalangan mempercayai sebagai siklus lima tahunan.⁵ Sejauh ini, banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Barat memiliki cakupan wilayah genangan yang luas, berdasarkan data BPBD DKI dimana genangan air paling banyak akibat banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta terjadi di wilayah Jakarta Barat yaitu sebanyak 23 titik⁶.

Terkait dengan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara tepat, cepat, berdasarkan prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan. Kondisi

yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan program pengurangan resiko bencana terhadap kemungkinan terjadinya bencana di seluruh Wilayah Ibu Kota, yang menyebabkan besarnya korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana.

Secara hukum Kodim 0503/KB memiliki kapasitas dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan penanggulangan bencana alam di wilayah Jakarta Barat. Peran tersebut sudah berjalan cukup lama dan sifatnya bukan bentuk ekspansi, untuk mencampuri atau mengambil alih peran tugas pokok institusi lain, akan tetapi semata-mata merupakan panggilan moral dan fungsional satuan kewilayahan dalam rangka menunaikan “tugas kemitraan ” atau “tugas perbantuan” kepada institusi atau lembaga lain untuk berKerjasama. Sepanjang diperlukan dengan kemampuan dan batas kemampuan TNI sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi kesiapan Kodim 0503/KB dihadapkan pada ancaman bencana alam khususnya banjir yang frekuensinya relatif tinggi, merupakan suatu tantangan berat

⁵ Sejarah Banjir Jakarta, dikutip dari: <https://bangazul.com/sejarah-banjir-di-jakarta/>, diakses pada 10 Agustus 2018.

⁶ Terbanyak di DKI, Jakarta Barat Punya 23 Titik Banjir, dikutip dari: <https://megapolitan.kompas.com>, akses pada 10 Agustus 2018

yang harus dihadapi oleh personel Kodim 0503/JB di lapangan.

Penanggulangan bencana yang diatur dalam undang-undang 24/2007, telah menetapkan prinsip dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tahapan-tahapan beserta alur penyelenggaraan dari tiap tahap. Namun demikian dalam tahap mitigasi, TNI tidak menjadi bagian dari penyelenggara, sehingga terkesan bahwa pemerintah sengaja menjauhkan TNI dengan rakyat. Sedangkan apabila mendalami doktrin Militer, TNI menetapkan pembinaan teritorial sebagai salah satu fungsi militer yang dalam pelaksanaannya mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan geografi dan demografi yang sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan mitigasi bencana. Dengan ketiadaan pelibatan TNI dalam tahapan mitigasi, menimbulkan sebuah persepsi, bahwa seolah-oleh undang-undang ini sengaja diarahkan untuk mencegah kegiatan militer dalam pembinaan geografi dan demografi sebagai suatu upaya untuk mempersempit ruang gerak militer terutama dalam pembinaan teritorial. Militer hanya dilibatkan dalam tahapan tanggap darurat, yang tidak menggambarkan keterlibatan militer

dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan, karena beberapa tahapan penanggulangan, TNI secara institusional tidak dilibatkan.

Terkait dengan hal tersebut, Jakarta merupakan kota yang memiliki predikat daerah khusus, memiliki karakter dan ciri-ciri yang khusus. Jakarta sebagai ibukota negara, menjadi *center of interest* bagi siapapun yang berada di Indonesia. Selain sebagai ibukota negara, Jakarta juga berperan sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perekonomian serta pusat kebudayaan. Daerah Khusus Jakarta memiliki daya tarik tertentu yang dapat membuat siapapun untuk ke Jakarta. Pertambahan penduduk dari luar Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Mudik lebaran yang telah menjadi tradisi untuk kembali ke kampung halaman, menjadi magnet untuk ke Jakarta. Pemudik kembali ke Jakarta membawa serta keluarga, kerabat, bahkan mungkin tetangga yang turut ke Jakarta bertujuan untuk mengadu nasib. Pertambahan *urban* ini menjadi salah satu penyebab Jakarta sarat dengan masalah. Masalah yang timbul berupa masalah sosial misalnya kependudukan, kebersihan, kemacetan, sampai masalah kriminalitas yang terus meningkat. Masalah lain yang

sampai saat ini belum dapat diatasi adalah banjir.

Kepadatan penduduk menjadi masalah yang sangat kompleks dan memerlukan pemikiran yang sangat serius untuk menyelesaikannya. Jumlah penduduk Jakarta Barat pada tahun 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Khususnya wilayah Jakarta Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI mencatat kepadatan penduduk di wilayah Jakarta Barat 19,02 ribu per kilometer (km) persegi. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah Jakarta lainnya dan juga di atas kepadatan Provinsi DKI, yakni hanya 15,37 ribu per km persegi. Artinya, selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk di Ibu Kota bertambah 269 jiwa setiap hari atau 11 orang per jam.⁷ Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan ruang/*space* untuk tempat tinggal. Banyak lahan kosong yang dibangun untuk perumahan atau bangunan. Akibatnya, lahan RTH semakin sempit yang menyebabkan resapan air berkurang. Di tahun 2018, Pemda DKI melaksanakan

pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) dengan mengucurkan dana sebesar 1,95 triliun (alokasi pembebasan lahan seluas 50 hektar). Dari 50 hektare lahan yang dibebaskan, direncanakan akan dibangun 15 RTH yang tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Namun angka tersebut masih terhitung kecil dari target 2030 yang mengharuskan adanya ruang terbuka hijau 30 persen dari luas wilayah Jakarta. Saat ini, ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Jakarta hanya sekitar 10% dari total wilayah DKI Jakarta⁸. Selain itu, kedisiplinan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan saluran air menjadi tersumbat. Tumpukan sampah di pinggir sungai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

Dalam UU RI No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan pasal 10 ayat 3 huruf c disebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk melaksanakan Operasi Militer Selain

⁷ Jumlah Penduduk DKI, dikutip dari: <https://jakarta.bps.go.id/subject/155/gini-rasio.html#subjekViewTab3>, diakses pada 17 Mei 2018

⁸ Pemprov DKI Alokasikan Rp 195 triliun untuk Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru, dikutip dari: <http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/28/>, akses 17 Mei 2018

Perang”. Dengan disahkannya UU RI No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditegaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satunya adalah tugas penanggulangan bencana yaitu pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”.

Kodim 0503/JB sebagai satuan teritorial di wilayah Jakarta Barat yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Perkasad Nomor/111 / XII / 2012 tanggal 12 Desember 2012 yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem. Juga memiliki serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam UU TNI. Dengan meningkatkan kemampuan personel Kodim 0503/JB, tugas penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab besar diharapkan semakin meningkatkan peran TNI AD dalam salah satu tugas OMSP. Kodim 0503/JB sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam

penanggulangan bencana, berkewajiban untuk mengatasi bencana yang terjadi di wilayah binaannya. Jakarta Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara, serta simbol negara, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dituntut untuk selalu dalam keadaan aman. Kaeamanan ini untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, kerentanan DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat yang semakin tinggi terhadap bencana khususnya bencana banjir, menuntut adanya bantuan. Kodim 0503/JB dituntut untuk selalu memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugas OMSP. Salah satu bentuk dari kontribusi Kodim 0503/JB adalah membantu penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan penanggulangan bencana, dengan judul : Kerjasama Kodim 0503/JB Dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat Untuk Menangani Banjir Guna Mewujudkan Stabilitas di Wilayah Jakarta Barat

Teori Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani,

kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁹ Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama¹⁰. Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani (Sosiologi Skematika: Bumi Aksara, 1994), mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Roucek dan Warren (Busro 1963), kerjasama adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Bentuk-Bentuk Kerjasama¹¹

Terdapat 5 bentuk kerjasama yaitu:

a. *Bargaining atau Tawar Menawar.*
Bargaining yaitu kerjasama yang

terbentuk karena adanya perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih.

b. *Koalisi.* Koalisi yaitu kerjasama yang terbentuk karena adanya perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama.

c. *Cooptation.* Cooptation yaitu kerjasama yang terbentuk karena adanya proses penerimaan hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar lebih seimbang.

d. *Joint venture atau usaha patungan.* Joint venture yaitu kerjasama yang terbentuk antara banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda karena adanya proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan.

e. *Kerukunan.* Kerukunan merupakan bentuk kerjasama yang didasari atas kerukunan yang terjalin antar individu atau kelompok.

Faktor Pendorong Kerja Sama¹²

Ada beberapa faktor pendorong yang membuat seseorang atau kelompok untuk melakukan kerjasama dengan orang atau kelompok lain, diantaranya:

⁹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h.156.

¹⁰ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. h.492.13

¹¹ Bentuk Kerjasama, dikutip dari: <https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html>

¹² Faktor Pendorong Kerja Sama, dikutip dari <https://artikeltop.xyz/faktor-pendukung-dan-penghambat-kerjasama.html>.

- a. Orientasi. Orientasi atau pandangan setiap orang pada kelompoknya sendiri dari mulai arah, tujuan, atau kepentingan-kepentingan lain. Untuk mencapai orientasi tersebut, setiap anggota kelompok tersebut mengharap dan mengandalkan bantuan dari anggota kelompoknya. Misalnya kerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok.
- b. Ancaman dari luar (musuh bersama). Adanya ancaman atau musuh yang sama yang dapat mengancam ikatan kesetiaan atau persaudaraan yang secara tradisional dan institusional telah tertanam di setiap anggota kelompoknya. Misal, adanya semangat membela tanah air dari setiap ancaman dan gangguan dari negara lain.
- c. Rintangan dari luar. Kelompok terkadang akan ada kekecewaan atau rasa tidak puas karena tidak tercapainya cita-cita yang diinginkan. Danya kekecewaan dan rasa tidak puas tersebut kemudian akan menimbulkan sifat agresif dan membutuhkan kerja sama di antara anggotanya.
- d. Mencari keuntungan pribadi. Terkadang seseorang berharap dapat memperoleh keuntungan yang diinginkannya, karena hal tersebut,

maka seseorang tersebut memiliki keinginan untuk bekerja sama.

- e. Menolong orang lain. Kerja sama terkadang terbentuk karena adanya rasa ingin menolong seseorang atau kelompok lain agar meringankan beban penderitaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Misalnya kerja sama mengumpulkan dana untuk korban bencana alam.

Teori Organisasi

Teori Organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut.

Menurut Lubis dan Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membeberakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari

kerjasama pada setiap individu. Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, mencakup masalah teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang. Yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern.

Teori modern ditandai dengan ahirnya gerakan *contingency* yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan Robert Kahn dalam bukunya "*the social psychology of organization*" mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Buku tersebut mendeskripsikan keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dari sebuah organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah jika organisasi ingin tetap bertahan

Teori Manajemen

Teori manajemen berkembang dengan sangat cepat terutama dengan adanya berbagai studi yang dilakukan oleh banyak perguruan tinggi yang kemudian menghadirkan berbagai teori manajemen dari beberapa aliran.

Intelektual Perancis Pierre Bourdieu melihat manajemen sebagai sosial *field*, yaitu sebuah arena sosio-kultural yang spesifik dimana aktor tertentu bermain dalam menciptakan konstruksi dan transformasi sosial. Teori manajemen bisa dipahami sebagai sebuah proses sosial dan figur sosial. Sebagai proses sosial, teori manajemen adalah proses bagaimana organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai figur sosial, teori manajemen adalah kelompok sosial, biasanya terdiri dari eksekutif dan manajer, yang bekerja untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi demi mencapai tujuan organisasi. Lahirnya teori manajemen tidak lepas dari sejarah pemikiran manajerial yang memiliki tiga kontributor utama, yaitu praktisi, konsultan dan akademisi. Kontribusi praktisi dan konsultan pada pemikiran manajerial dan teori manajemen lebih cenderung bersifat preskriptif dan praktis. Sedangkan kontribusi akademisi

pada teori manajemen lebih cenderung analitis.¹³

Teori Penanggulangan Bencana

Menurut Hyogo Framework (*International Strategy for Disaster Reduction ISDR:1994*), Bencana (*disaster*) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.¹⁴

Menurut Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis.¹⁵

Sementara risiko merupakan kerugian yang diderita atau diterima oleh masyarakat yang terpengaruh dari semua aspek tersebut. Apabila *hazard*/bahaya tinggi, maka risiko akan semakin besar dan kerugian yang diderita semakin banyak. Namun sebaliknya, apabila kapasitas tinggi, maka risiko yang diterima kecil.

Berdasarkan pada terori diatas, maka konsep dalam penanggulangan bencana, menuntut kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana, Hal ini mulai muncul pada dekade 1900-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Beberapa konferensi tingkat dunia diinisiasi oleh United Nations International Strategy or Disaster Risk Reduction (UN-ISDR) yang merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditugaskan untuk mengawal Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Pada bulan Januari 2005, lebih dari 4.000 perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), institusi akademik dan sector swasta berkumpul di Kobe, Jepang pada World Conference on Disaster Reduction

¹³ <http://sosiologis.com/teori-manajemen>

¹⁴ ISDR, 2004, *Living with Risk " A Hundred Positive Examples of How People are Making The World Safer"* United Nation Publication, Geneva, Switzerland, 2004.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.

(WCDR) kesebelas. Konferensi tersebut mengakhiri perundingan-perundingan tentang Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015; Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana (Hyogo Framework for Action/HFA).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh subyek pelaku antara lain perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹⁶. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif menurut John W. Creswell ada lima yaitu: Naratif, Fenomenologi, Grounded Theory, Etnografis dan Studi Kasus.

Subyek penelitian adalah para informan yang terkait dalam bidang tugasnya masing-masing. Para Informan tersebut Unsur pimpinan Kodim 0503/JB dan Kepala BPBD Jakarta Barat.

Objek penelitian adalah Kerjasama antara Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam rangka menangani banjir dalam mewujudkan stabilitas di wilayah.

Analisa Data dan Pembahasan Kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam menangani Banjir guna mewujudkan Stabilitas di Wilayah

Kesiapsiagaan menghadapi bencana mengacu pada pasal 1 angka 7 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan menghadapi bencana juga merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut membentuk suatu bagian yang tak terpisahkan dalam sistem nasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perencanaan dan program pengelolaan bencana. Tujuan khusus dari upaya kesiapsiagaan bencana banjir adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap di tempatnya masing-masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi korban bencana sehingga

¹⁶ Moleong, Lexy J, (2012) *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)* PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hal 6.

dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan.

Mendasari hal tersebut, dimana dalam kenyataannya Kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam menangani banjir guna mewujudkan stabilitas di wilayah sejauh ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana teori yang disampaikan oleh Roucek dan Warren, yang mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama¹⁷. Hal ini sejalan dengan tanggapan yang dikemukakan oleh informan, dimana sejauh ini kerjasama antara Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam menangani banjir telah terlaksana namun dinilai masih belum berjalan dengan baik khususnya pada kegiatan penugasan pelaksanaan kesiapsiagaan dan melaksanakan pelatihan siaga/simulasi, gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana banjir. Hal ini

seharusnya dapat terlaksana, dikarenakan kedua institusi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin sistem penanggulangan bencana banjir dapat berjalan dengan baik, dan seharusnya kerjasama tersebut dapat berjalan dengan optimal apabila Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dapat saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama dan ada komunikasi yang komunikatif antara Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat¹⁸

Mendasari permasalahan yang ada serta tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh informan, dimana berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kerjasama antara Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam penanggulangan bencana banjir sejauh ini masih belum dapat terselesaikan, hal ini lebih disebabkan oleh:

a. Dari segi kelembagaan yang belum sinergis, kurang terjalin hubungan kerjasama/networking dengan semua level unsur. Guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan

¹⁷ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h.156.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dandim 0503/JB tgl 9 Juni 2018 pk1 08.00 diMakodim 0503/JB.

bencana banjir dan penanganan pengungsi mulai dari tingkat desa atau kelurahan sampai kabupaten atau kota maka perlu mekanisme dalam suatu sistem yang dapat mendorong kemandirian dan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat.

- b. *Implementasi kebijakan kurang terjalin hubungan yang sinergis antar instansi pemangku kebijakan dalam memobilisasi sumber daya yang ada.* Dalam hal ini padahal kebijakan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang di dalamnya mengatur tentang berbagai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan siklus manajemen bencana meliputi tahap sebelum bencana, tahap saat bencana dan tahap pasca bencana.
- c. *Komando pengendalian dalam penanganan bencana banjir, dinamakan unsur terkait masih bersifat egosentris, kurangnya alat komunikasi / perhubungan.* Untuk kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Jakarta Barat, satuan Kodim 0503/JB bergabung dengan unsur-unsur satuan tugas yang tergabung dalam unit penanggulangan bencana.

- d. *Sumber Daya Manusia (SDM) terutama personel Kodim 0503/JB sangat minim dan kurangnya personel Kodim yang mempunyai kualifikasi kebencanaan.* Dalam hal ini, Sumber daya manusia terutama personel menjadi unsur utama dalam setiap aktifitas yang dilakukan dalam organisasi.
- e. *Sarana prasarana yang dimiliki satuan Kodim 0503/JB sangat minim dan terbatas.* Sarana Prasarana memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam. Material atau peralatan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas karena bencana tidak dapat ditanggulangi secara efektif dan cepat tanpa menggunakan sarana material atau peralatan yang memadai.
- f. *Anggaran terbatas dan tidak ada anggaran untuk kebencanaan, dalam penanggulangan bencana logistik didukung oleh instansi yang meminta/anggaran APBD.* Kebijakan tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana mengatur hal-hal yang terkait dengan sumber dana penanggulangan bencana, penggunaan dana penanggulangan bencana, pengelolaan bantuan

bencana serta pengawasan pelaporannya.

Dari pembahasan tersebut, dapat dianalisa bahwa agar *upaya mewujudkan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam menangani banjir* dapat berjalan secara optimal apabila keseluruhan kegiatan pada tahap tanggap darurat dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan teori/konsep dalam penanggulangan bencana, yang intinya mengatakan bahwa bencana (*disaster*) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai kerugian dan melampaui kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri, sehingga dalam penanggulangannya menuntut adanya kerjasama pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya pengurangan risiko bencana. Konsekuensi dari hal tersebut, maka secara umum tahap tanggap darurat bencana banjir dapat berjalan efektif karena adanya kerjasama antara Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat.

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana

banjir sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. Pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan beban berbagai pihak yang menyediakan sumber daya baik pemerintah pusat Melalui BNPB serta pemerintah daerah melalui BPBD. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi dapat di capai melalui koordinasi antara instansi/lembaga yang terkait, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Mendasari hal tersebut, maka langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Kerjasama antara Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam menangani banjir.

Mewujudkan Kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam Menangani Banjir.

Dalam upaya mewujudkan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam menangani banjir, dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi organisasi penanggulangan bencana. Menurut Kusumasari (2014: 45) bahwa faktor penting dalam manajemen bencana, kapabilitas (kemampuan) dalam kelembagaan, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, keuangan dan kepemimpinan. Dengan melihat kapabilitas organisasi dapat memungkinkan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan strategi. Kota Jakarta Barat merupakan wilayah yang rawan bencana karena letak geografi, geologis dan demografinya.
- b. Optimalisasi pelaksanaan prosedur tetap penanggulangan bencana. Implementasi dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Jakarta Barat masih sangat kurang dan belum optimal.
- c. Optimalisasi kepemimpinan di lapangan. Kota Jakarta Barat apabila terjadi bencana alam maka dalam pengendalian bencana pada saat tanggap darurat pelaksanaannya di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal ini sebagai supervisi yaitu Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (KPBDPK) Kota Jakarta Barat. Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Satgas PRC PB) Kodim 0503/JB di bawah kendali Dandim 0503/JB.
- d. Optimalisasi personel. Sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Untuk mengetahui kualitas SDM yang ada di Kodim 0503/JB dalam hal kebencanaan dapat dilihat dalam rekapitulasi kekuatan personil tentang kualifikasi pendidikan.
- e. Optimalisasi materil. Dalam manajemen kebencanaan materil termasuk di dalam manajemen logistik dan peralatan. Manajemen logistik dan peralatan itu bukanlah segala-galannya, akan tetapi tanpa logistik semua upaya penanggulangan bencana menjadi tidak berarti. Salah satu faktor pendukung agar personel mampu melaksanakan tugas penanggulangan bencana tersebut dengan baik karena adanya material dan peralatan yang lengkap.
- f. Optimalisasi keuangan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan

Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Satgas PRC PB) Kodim 0503/JB diperlukan pengaturan anggaran. Administrasi dan logistik mempunyai peran penting guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penanggulangan bencana banjir di Kota Jakarta Barat

Upaya mengeliminir kendala dalam rangka mengoptimalkan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat pada penanggulangan Banjir.

Kodim sebagai Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dalam pelaksanaan tugas dan perannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di antaranya dalam OMSP yaitu membantu pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana. Peran Kodim 0503/JB dalam penanggulangan bencana banjir dalam mengatasi kendala-kendala seperti kelembagaan kebencanaan dioptimalkan dengan melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang terus menerus antar instansi dan lembaga penanggulangan bencana. Kendala lain yang dihadapi guna mewujudkan kerjasama dalam penanggulangan Banjir, Kodim 0503/JB perlu melaksanakan

penyamaan persepsi melaksanakan latihan teknis dan taktis seperti Geladi Posko agar dalam melaksanakan tugas dapat sinergis dengan unsur instansi dan lembaga terkait. Untuk kemampuan personel maupun Satuan Kodim 0503/JB dalam kebencanaan, perlu dioptimalkan melalui pendidikan dan latihan bersama dengan unsur instansi dan lembaga secara teknis ataupun taktis agar lebih efektif dan efisien. Optimalisasi sarana prasarana Kodim 0503/JB berupa materiil yang kurang lengkap dengan mengefektifkan sarana yang ada dan berkoordinasi dengan instansi serta lembaga yang terkait dalam setiap pelaksanaan tugas penanggulangan bencana banjir di Kota Jakarta Barat.

Keberhasilan tugas satuan penanggulangan bencana harus didukung dengan peningkatan anggaran atau keuangan yang berasal APBD Kota Jakarta Barat, satuan instansi dan lembaga pengguna. Kodim 0503/JB dalam mengoptimalkan anggaran penanggulangan bencana dengan melaksanakan kegiatan kebencanaan sesuai dengan anggaran dari komando atas untuk dilaksanakan secara optimal. Kodim 0503/JB sebagai satuan kewilayahan melaksanakan perannya membantu pemerintah daerah dalam

penanggulangan bencana banjir yang secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil dari mengoptimalkan kerjasama dalam penanggulangan bencana banjir dimana peran Kodim 0503/JB harus dilaksanakan secara terus menerus agar membawa perubahan dan peningkatan dari beberapa aspek sesuai dengan mekanisme manajemen bencana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh “Kerjasama Kodim 0503/JB Dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat Untuk Menangani Banjir Guna Mewujudkan Stabilitas di Wilayah Jakarta Barat, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Kerjasama Kodim 0503/Jb dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam Menangani Banjir. Peran Kodim 0503/JB dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Jakarta Barat dilaksanakan sesuai manajemen bencana dengan memberikan perbantuan kepada pemerintah daerah pada tahap sebelum, saat dan pasca bencana. Namun Peran yang dilakukan satuan Kodim 0503/JB belum dapat dilaksanakan dengan optimal hal ini karena adanya kendala-kendala yang

dihadapi yaitu kelembagaan yang masih kurang terkoordinasi dengan baik sesuai tugas penanggulangan bencana Kota Jakarta Barat, implementasi kebijakan yang masih egosentris, komando pengendalian belum terkoordinasi dengan baik, jumlah personel satuan yang sedikit, sarana prasarana yang terbatas dan kurangnya anggaran.

b. Upaya mengeliminir kendala dalam rangka mengoptimalkan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat pada penanggulangan Banjir. Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat pada penanggulangan Banjir terjadi diantaranya dimana Pejabat BPBD Jakarta belum menyadari bahwa kegiatan pada Pasca Bencana ini dapat dilakukan oleh Kodim 0503/JB. Disamping itum Kodim 0503/JB sendiri belum pernah menampilkan kemampuannya atau mensosialisasikan kepada pemerintah daerah tentang bantuan kegiatan Kodim 0503/JB pada rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Hal ini membuat adanya pemikiran dari pihak

Pemerintah Kota Jakarta Barat khususnya BPBD Jakarta Barat bahwa Kodim 0503/JB mempunyai keterbatasan dalam membantu BPBD Jakarta Barat pada tahap pasca bencana. Disamping itu masih kurangnya kemampuan dari unsur pimpinan, baik pimpinan BPBD Jakarta Barat maupun Kodim 0503/JB dalam menjalankan koordinasi khususnya pada tahap pasca bencana.

Mendasari hal tersebut, maka dalam rangka mengatasi kendala-kendala seperti kelembagaan kebencanaan dioptimalkan dengan melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang terus menerus antar instansi dan lembaga penanggulangan bencana. Kendala lain yang dihadapi guna mewujudkan kerjasama dalam penanggulangan Banjir, Kodim 0503/JB perlu melaksanakan penyamaan persepsi melaksanakan latihan teknis dan taktis seperti Geladi Posko agar dalam melaksanakan tugas dapat sinergis dengan unsur instansi dan lembaga terkait. Untuk kemampuan personel maupun Satuan Kodim 0503/JB dalam kebencanaan, perlu dioptimalkan melalui pendidikan dan latihan bersama dengan unsur instansi dan lembaga secara teknis ataupun

taktis agar lebih efektif dan efisien. Optimalisasi sarana prasarana Kodim 0503/JB berupa materiil yang kurang lengkap dengan mengefektifkan sarana yang ada dan berkoordinasi dengan instansi serta lembaga yang terkait dalam setiap pelaksanaan tugas penanggulangan bencana banjir di Kota Jakarta Barat.

- c. Implikasi dari bentuk kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam penanggulangan bencana banjir berdampak terhadap segala aspek kehidupan di masyarakat seperti pada aspek geografi menumbuhkan kesadaran, kepedulian lingkungan, motivasi memanfaatkan lahan kritis, aspek demografi merubah pola pikir masyarakat untuk waspada terhadap ancaman bencana, aspek ideologi membentuk keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana banjir, terciptanya kondisi politik yang aman dan kondusif, terwujudnya kelancaran dan kelangsungan perekonomian di wilayah, dan menumbuhkan jiwa sosial dan kegotong-royongan masyarakat serta terciptanya kondisi keamanan wilayah yang aman, tertib dan tangguh di wilayah Kota Jakarta Barat.

Saran

a. Saran Teoritis

Mendasari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu keada teori-teori tentang kerjasama dan penanggulangan bencana yang kemudian menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam upaya menangani banjir sejauh ini dipandang belum optimal. Oleh karena itu, kedepannya: peneliti-peneliti lainnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait bahasan yang sama dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan atau mix method dengan pemahaman teori yang dapat terukur sehingga menghasilkan temuan dan simpulan yang efektif dan dapat digunakan secara operasional untuk mewujudkan kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam upaya menangani banjir. Disamping itu perlu adanya pengembangan penelitian-penelitian yang terkait tentang penanganan banjir, sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya penanggulangannya.

b. Saran Praktis

- 1) Mengingat sangat dibutuhkanannya peran TNI AD dalam menangani bencana, maka dalam hal ini perlu dibuat Prosedur Operasi Tetap dan Rencana Tindakan Menghadapi Kontijensi secara terpadu TNI AD bersama-sama Pemda dan Instansi terkait.
- 2) Perlu segera dibuatnya MoU antara TNI AD di daerah dengan Pemkot sebagai landasan operasional bagi aparat Kowil dalam mempertanggung jawabkannya, baik secara administrasi maupun hukum dalam pencegahan dan penanganan bencana banjir yang terjadi di wilayahnya.
- 3) Perlu adanya kerjasama dengan masyarakat dengan dibentuk mitra karib yang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dengan adanya komunikasi dengan media sosial bagi Babinsa dan mitra karib diharapkan proses temu cepat dan lapor cepat terhadap kejadian dan informasi mengenai potensi bencana banjir dapat diketahui secara cepat dan dapat dicegah

sehingga tidak merugikan masyarakat. Hal ini sekaligus sebagai system peringatan dini (*early warning system*) yang merupakan wujud dari kerjasama dengan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- 4) Perlu dilaksanakan latihan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh *stakeholders* agar tercipta sinergitas antara Kodim dengan Pemkot dalam penanggulangan bencana banjir.
- 5) Sebagai jabaran dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana dalam UU tersebut belum menjelaskan tentang kewenangan, tugas dan tanggungjawab TNI secara detail. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya penjelasan secara konkrit terkait kewenangan, tugas dan tanggungjawab TNI. Sehingga secara dini dapat diantisipasi langkah-langkah yang harus diambil. Siapa yang dilibatkan, apa tugasnya, materiil/sarana yang digunakan, bagaimana koordinasinya dan siapa yang mengendalikan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

Daftar Pustaka

- 97 Titik Rawan Banjir di Jakarta Barat, dikutip dari: <https://megapolitan.kompas.com/A da.97.Titik.Rawan.Banjir.di.Jakarta. Barat>, diakses pada 20 Juni 2018
- Abror, M. D. 2014. Governance Systems Analysis (GSA) Kerangka kerja untuk Mereformasi Sistem Pemerintahan. Jurnal Universitas
- Ansell, C. dan Alison G. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal Of Public Administration Research And Theory. University of California: Berkeley.
- Abdulsyani, 1994. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara
- W.J.S. Purwadarminta, 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Potensi Ancaman Bencana, dikutip dari : <https://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/potensi-ancaman-bencana>, diakses pada Mei 10 Mei 2018
- Buku Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Teritorial, 2007
- Donahue, J., Richard Z. 2011. Collaborative Governance (Private Roles For Public Goals in Turbulent Times). Princeton University Press: Princeton and Oxford.
- Dulkadir, Armaidly Armawi dan Danang Sri Hadmoko (2016): Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kodim 0614 Kota Cirebon, Jawa Barat), dikutip dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/10581>, diakses pada 15 Mei 2018
- Hirta Juni Adriansya (2015) : Sinergitas Kodim 0402/OKI Dengan Pemda

- Ogan Komering Ilir Dalam Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dan Kabut Asap Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Tahun 2015, dikutip dari: <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/149>, diakses pada 15 Mei 2018
- Jumlah Penduduk DKI, dikutip dari: <https://jakarta.bps.go.id/subject/155/gini-rasio.html#subjekViewTab3>, diakses pada 17 Mei 2018
- Markas Besar Angkatan Darat, 2001, Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”, DK : AD-01.
- Modul Manajemen Bencana, dikutip dari : http://bpb.d.banyuwangikab.go.id/docpub/Modul_Pengantar_Manajemen_Bencana.pdf, diakses pada 8 Mei 2018*
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2013 – 2017
- Pemprov DKI Alokasikan Rp 195 triliun untuk Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru, dikutip dari: <http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/28/>, akses 17 Mei 2018
- Peraturan Kepala BNPB No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Ratner. 2012. Collaborative Governance Assessment. Malaysia: CGIAR.
- Sugiono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Yoyok Wahyudi (2017) Sinergi Satuan Komando Kewilayahan Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Di Kodim 0609/KAB. BANDUNG) dikutip dari : jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SMK/article/download/151/136, diakses pada 15 Mei 2018
- Yudharta Pasuruan. Afful-Koomson, T., dan Kwabena O. A. 2013. Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa. Africa: Pixedit Limited.